

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Secara umum, dinamika harga bahan kebutuhan pokok penting (bapokting), barang lainnya, dan jasa di Kabupaten Ciamis selama triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan pola yang bervariasi, mencerminkan kompleksitas faktor penawaran dan permintaan di pasar lokal dan regional. Periode ini sangat krusial mengingat adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, yang secara historis selalu menjadi pemicu utama gejolak harga. Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Ciamis memberikan gambaran awal mengenai fluktuasi harga di tingkat lokal, sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tasikmalaya berfungsi sebagai indikator proksi yang relevan untuk memahami tren regional. Perbandingan dengan data inflasi Provinsi Jawa Barat juga esensial untuk menempatkan kondisi Ciamis dalam konteks yang lebih luas, mengidentifikasi kesamaan pola atau anomali yang mungkin terjadi.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Ciamis pada Januari 2025 menunjukkan adanya tekanan harga di awal bulan, dengan IPH mencapai 3.28% pada Minggu 1 dan sedikit meningkat menjadi 3.35% pada Minggu 2, sebelum mengalami penurunan moderat menjadi 2.74% pada Minggu 3. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa meskipun ada fluktuasi, secara keseluruhan terdapat kecenderungan kenaikan harga di awal tahun. Namun, tren ini berbalik pada Februari 2025, di mana Kabupaten Ciamis mencatat deflasi IPH sebesar -1.36% pada Minggu 1 dan -1.25% pada Minggu 2. Penurunan harga ini, yang mengindikasikan deflasi, sebagian besar dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, yang secara umum juga menjadi andil deflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Memasuki bulan Maret 2025, IPH Kabupaten Ciamis tercatat sebesar 2.52%, menunjukkan adanya peningkatan kembali setelah periode deflasi, yang menandakan tekanan inflasi mulai muncul menjelang HBKN.

Analisis lebih lanjut terhadap perbandingan harga komoditas pangan utama antara Januari dan Februari 2025, serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya, mengungkapkan pola yang beragam. Harga beras medium menunjukkan stabilitas atau bahkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, yang merupakan kabar baik bagi daya beli masyarakat. Namun, komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan harga, dengan bawang putih menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Di sisi lain, cabai merah mengalami penurunan harga yang drastis, menjadikannya faktor penekan inflasi. Sebaliknya, cabai rawit merah dan gula pasir menunjukkan tren kenaikan harga, sementara daging ayam ras dan telur ayam ras cenderung stabil atau sedikit menurun, meskipun daging ayam ras seringkali menjadi penyumbang inflasi utama menjelang HBKN. Pada bulan Maret, harga cabai rawit merah meningkat menjadi Rp98.750 per kg, yang dapat memicu inflasi lebih lanjut, sementara harga daging sapi tetap stabil di Rp136.250 per kg.

Dalam konteks regional, meskipun data IHK spesifik untuk Kabupaten Ciamis tidak tersedia, IHK Kota Tasikmalaya memberikan gambaran yang relevan. Inflasi year-on-year Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan dari 1.32% pada Desember 2024 menjadi 1.94% pada Februari 2025, mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang terus berlanjut di wilayah Priangan Timur. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan berhasil menjaga inflasi tahunan pada Januari 2025 di angka 0.79%, yang berada di bawah target nasional. Namun, perlu dicatat bahwa kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menjadi pemicu inflasi utama di tingkat provinsi, dengan komoditas seperti emas perhiasan, minyak goreng, beras, kopi bubuk, dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi signifikan. Dengan

adanya data IPH yang menunjukkan peningkatan di Maret, kemungkinan besar IHK di Tasikmalaya juga akan terpengaruh oleh tren inflasi yang sama.

Melihat ke depan, beberapa risiko inflasi perlu diantisipasi secara serius. Periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri secara inheren membawa potensi kenaikan harga pangan, dengan daging ayam ras diprediksi menjadi andil inflasi utama. Fluktuasi harga pangan global dan ketergantungan pada impor untuk komoditas strategis seperti gula dan garam juga dapat memicu tekanan inflasi. Selain itu, perubahan iklim, seperti curah hujan tinggi, berpotensi mengganggu produksi hortikultura dan pasokan beras. Peningkatan biaya produksi dan logistik, termasuk kenaikan harga pakan, serta praktik spekulasi dan penimbunan, juga merupakan faktor-faktor yang dapat memperparah kenaikan harga, menuntut kewaspadaan dan intervensi yang proaktif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ciamis. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas harga dapat terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga selama periode kritis ini.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan data dan integrasi sistem. Meskipun Kabupaten Ciamis melaporkan data harian secara rutin, terdapat catatan bahwa data tidak selalu lengkap pada beberapa tanggal di bulan Februari untuk seluruh komoditas. Hal ini juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, seperti Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, yang mengalami kekurangan data pada periode tertentu. Kurangnya integrasi data yang sempurna antar daerah atau antar sistem, seperti antara Kota Cimahi dan Kabupaten Tasikmalaya, dapat menghambat pemantauan harga yang akurat dan real-time, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat dalam pengendalian inflasi.

Fluktuasi produksi dan pasokan pangan juga menjadi permasalahan yang signifikan. Ketergantungan pada musim dan kondisi iklim menyebabkan ketidakpastian dalam produksi komoditas pertanian. Curah hujan tinggi yang terjadi pada bulan-bulan tertentu dapat mempengaruhi hasil panen hortikultura dan beras, yang pada gilirannya berdampak pada ketersediaan dan harga pangan di pasar. Prognosa defisit untuk 6-7 komoditas pangan strategis di Jawa Barat pada tahun 2025 menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, yang dapat memicu inflasi lebih lanjut jika tidak ditangani dengan baik.

Selain itu, distribusi dan logistik yang belum optimal menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi. Meskipun ada upaya perbaikan infrastruktur dan subsidi distribusi, masih terdapat kendala dalam memastikan kelancaran distribusi dari sentra produksi ke pasar, terutama di daerah terpencil. Kerjasama antar daerah (KAD) juga perlu diintensifkan untuk mengatasi kesenjangan pasokan antara daerah surplus dan defisit. Tanpa adanya sistem distribusi yang efisien, harga pangan dapat meningkat secara signifikan, terutama menjelang periode-periode kritis seperti HBKN.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah perilaku pasar dan spekulasi. Kenaikan harga yang tidak wajar sering kali dipicu oleh praktik spekulasi dan penimbunan, terutama menjelang HBKN, di mana permintaan pangan meningkat. Pengawasan yang ketat terhadap

praktik-praktik ini sangat diperlukan untuk mencegah lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, yang semakin diperparah jika pertumbuhan upah tidak sebanding dengan laju inflasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi perhatian, di mana efektivitas penggunaan alokasi anggaran untuk pengendalian inflasi perlu terus dievaluasi, dan ketersediaan Belanja Tidak Terduga (BTT) di tingkat kabupaten/kota harus dipastikan untuk intervensi mendesak.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang terangkum dalam 4 pilar utama: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

1. Keterjangkauan Harga:

Pemantauan Harga Harian: Dilakukan di pasar-pasar utama dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk barang pokok.

Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM): Melaksanakan kegiatan seperti operasi pasar murah bersubsidi, GPM, Pasar Tani, Pasar Leuweung, dan Pasar Pasamoan.

Subsidi atau Bantuan Langsung: Penyaluran bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Ketersediaan Pasokan:

Pengelolaan Stok Pangan: Melalui kerjasama dengan Bulog dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan pangan.

Dukungan pada Sektor Pertanian: Bantuan sarana produksi pertanian (pompanisasi, bibit/benih unggulan), pembentukan Petani Andalan Jawa Barat, dan edukasi Organic Tower Garden (OTG).

Program Pangan Terintegrasi (PANGSI): Kolaborasi dengan pondok pesantren di sektor pertanian dan perikanan.

Perbaikan Infrastruktur Pertanian: Operasi, pemeliharaan, peningkatan, dan rehabilitasi daerah irigasi.

Stabilisasi Pasokan dan Harga: Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP).

Akses Pembiayaan: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi resi gudang.

3. Kelancaran Distribusi:

Pengawasan Stok dan Distribusi: Monitoring berkala oleh Satuan Tugas Pangan Polda Jabar.

Bantuan Pangan: Diberikan kepada daerah rawan pangan dan masyarakat terdampak bencana.

Subsidi Distribusi: Untuk memastikan bahan pangan dari sentra produksi sampai ke pasar dengan harga terjangkau.

Perbaikan Infrastruktur Jalan: Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan menuju sentra produksi pertanian.

Pemantauan Distribusi: Dari produsen, distributor, hingga pedagang pasar.

Kerjasama Antar Daerah (KAD): Difasilitasi untuk mengurangi kesenjangan pasokan.

4. Komunikasi Efektif:

Rapat Koordinasi Dwi Mingguan: Dilaksanakan oleh TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Capacity Building: Peningkatan kapasitas TPID melalui kunjungan kerja untuk mempelajari praktik terbaik.

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah: Partisipasi dalam rapat koordinasi regional.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Capaian Positif:

Evaluasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis menunjukkan beberapa capaian positif yang patut dicatat. Pertama, inflasi tahunan di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Ciamis, pada Januari 2025 tercatat sebesar 0.79%, yang berada di bawah rentang target nasional ($2.5\% \pm 1\%$). Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian inflasi secara makro dan menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua di Pulau Jawa. Selain itu, penurunan harga cabai merah yang signifikan di awal tahun 2025 mencerminkan efektivitas intervensi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam meningkatkan ketersediaan pasokan komoditas tersebut. Adanya aplikasi SILINDA JABAR yang terintegrasi dengan sistem lokal di beberapa kabupaten/kota juga menunjukkan komitmen terhadap pemantauan harga yang lebih baik, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.

2. Area Perbaikan:

Meskipun terdapat capaian positif, masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan di Kabupaten Ciamis. Salah satunya adalah akurasi dan kelengkapan data. Masalah absensi dan ketidaklengkapan data input harga di beberapa kabupaten/kota, termasuk Ciamis, dapat mengurangi akurasi analisis dan kecepatan respons terhadap perubahan harga. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan data yang real-time dan komprehensif. Selain itu, efektivitas intervensi pasar, seperti operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), perlu dievaluasi lebih mendalam, terutama untuk komoditas yang terus mengalami kenaikan harga, seperti bawang putih dan gula pasir. Pengelolaan risiko defisit pangan juga menjadi perhatian, di mana prognosa defisit untuk beberapa komoditas pangan strategis menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi dan kerjasama antar daerah (KAD) perlu lebih diintensifkan.

3. Rekomendasi Kebijakan:

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan. Pertama, optimalisasi aplikasi SILINDA JABAR perlu dilakukan dengan memastikan input data harga pangan pokok strategis dilakukan secara rutin dan lengkap. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas penginput data di pasar juga penting untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data. Selain itu, program peningkatan produksi lokal harus diintensifkan, terutama untuk komoditas pangan strategis yang diprediksi mengalami defisit, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Kerjasama antar daerah yang proaktif juga harus dijalin untuk memastikan pasokan yang stabil, terutama menjelang periode kritis seperti HBKN.

4. Mitigasi Risiko dan Penguatan Kelembagaan:

Terakhir, mitigasi risiko dan penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis. Koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperlukan untuk mendapatkan informasi cuaca yang akurat, serta menyusun langkah-langkah antisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Selain itu, alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD Kabupaten Ciamis harus dipastikan tersedia dan fleksibel untuk intervensi pengendalian inflasi yang mendesak. Peningkatan kapasitas TPID melalui program capacity building dan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di tingkat lokal juga sangat penting untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi yang lebih efektif.

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, dengan mengacu pada arahan Kementerian terkait dan praktik terbaik:

1. Peningkatan Akurasi dan Integrasi Data:

Optimalisasi SILINDA JABAR: TPID Kabupaten Ciamis perlu memastikan input data harga pangan pokok strategis ke aplikasi SILINDA JABAR dilakukan secara rutin, harian, dan lengkap, termasuk pada hari libur. Perlu ada mekanisme verifikasi data yang lebih ketat.

Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas penginput data di pasar untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data.

Integrasi Sistem: Mendorong integrasi sistem data harga dari berbagai sumber (pasar tradisional, ritel modern, distributor) untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik.

2. Penguatan Ketersediaan Pasokan dan Peningkatan Produksi:

Program Peningkatan Produksi Lokal: Mengintensifkan program peningkatan produksi komoditas pangan strategis yang diprediksi defisit (Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit, Daging Sapi/Kerbau, Gula Pasir, Minyak Goreng, Kedelai). Ini dapat dilakukan melalui:

Subsidi Benih Unggul dan Alsintan: Memastikan penyaluran subsidi benih unggul dan alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran kepada petani.

Pengawasan Distribusi Pupuk: Mengawal distribusi pupuk secara intensif untuk mencegah

kelangkaan dan kenaikan harga.

Gerakan Penanaman Cepat Panen: Mendorong gerakan penanaman tanaman cepat panen di lahan pekarangan dan lahan petani, khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi.

Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang Proaktif: TPID Ciamis harus secara proaktif menjalin KAD dengan daerah surplus pangan untuk memastikan pasokan yang stabil, terutama menjelang HBKN. Perjanjian KAD harus mencakup volume, harga, dan jadwal pengiriman.

Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD): Memastikan pemenuhan standar CPPD sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, dan menggunakannya sebagai instrumen stabilisasi harga saat terjadi gejolak.

3. Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Pengawasan Pasar:

Optimalisasi Operasi Pasar dan GPM: Melaksanakan operasi pasar dan GPM secara lebih terarah dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis, komoditas prioritas, dan evaluasi dampak yang jelas.

Pengawasan Harga dan Stok: Mengintensifkan pengawasan harga komoditas pangan strategis agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP) di pasar tradisional maupun ritel modern.

Penegakan Hukum: Bersama Satgas Pangan, melakukan tindakan tegas terhadap praktik spekulasi dan penimbunan yang merugikan masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi dalam Distribusi: Mendorong penggunaan platform digital atau aplikasi untuk memfasilitasi distribusi pangan yang lebih efisien dan transparan.

4. Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dini:

Koordinasi dengan BMKG: Mengintensifkan koordinasi dengan BMKG setempat untuk mendapatkan informasi cuaca dan iklim yang akurat, serta menyusun langkah strategi antisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan ketersediaan pasokan.

Edukasi dan Komunikasi Publik: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi yang bijak dan tidak panik membeli (panic buying) menjelang HBKN.

Pengelolaan Administered Price: Pemerintah daerah diharapkan untuk tidak menaikkan harga kelompok Administered Price (seperti harga LPG, tarif air, dll.) pada periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjaga stabilitas harga.

5. Penguatan Kelembagaan dan Anggaran:

Alokasi Anggaran BTT: Memastikan ketersediaan dan fleksibilitas alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD Kabupaten Ciamis untuk intervensi pengendalian inflasi yang mendesak.

Peningkatan Kapasitas TPID: Melanjutkan program capacity building bagi anggota TPID, termasuk studi banding ke daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.

Melibatkan BUMD dan BUMDes: Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di tingkat lokal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.